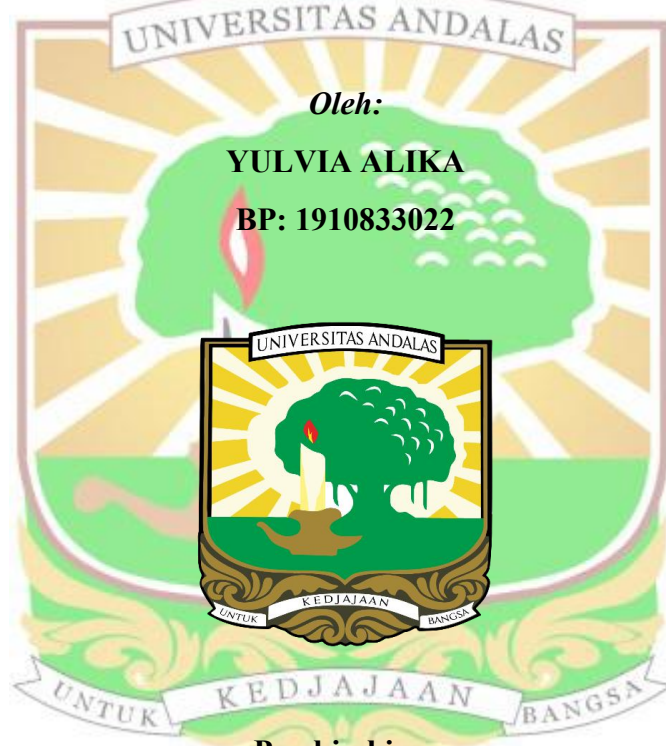


**POLITISASI BIROKRASI DALAM PROSES PERGANTIAN
JABATAN BIROKRASI PASCA KEKOSONGAN JABATAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN
2022**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



Oleh:

YULVIA ALIKA

BP: 1910833022

Pembimbing:

- 1. Dr. Tengku Rika Valentina, MA**
- 2. Doni Hendrik, S. IP, M. Soc.Sc**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

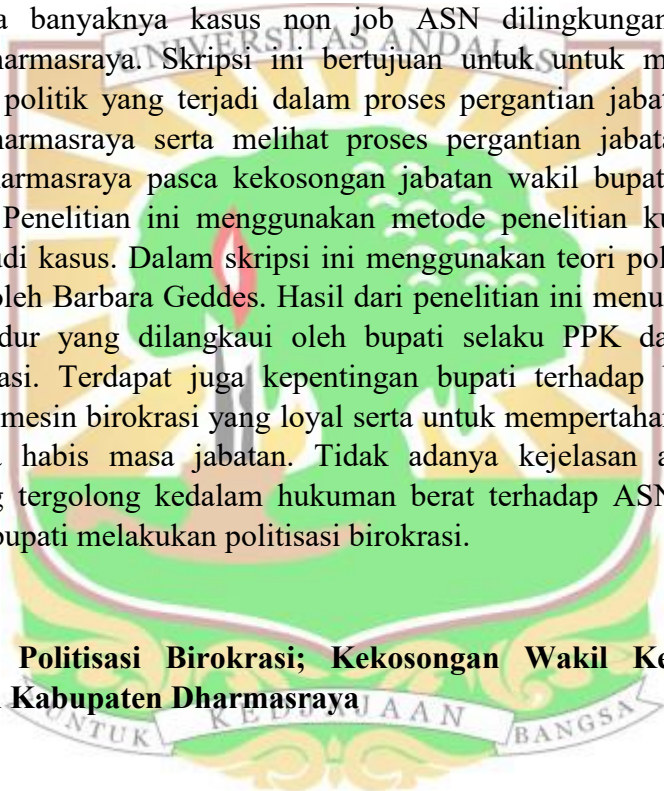
PADANG

2023

ABSTRAK

Politisasi birokrasi merupakan suatu fenomena yang berhubungan dengan terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan suatu jabatan politik yang akan mengespalai jabatan birokrasi di suatu daerah, oleh karena itu pengaruh politik tidak akan bisa dipisahkan dari birokrasi. Kabupaten Dharmasraya merupakan suatu daerah yang memiliki indikasi terjadinya politik birokrasi ini, dimana di Kabupaten Dharmasraya terjadi kekosongan jabatan wakil bupati yang berimbas pada banyaknya kasus non job ASN dilingkungan pemerintahan Kabupaten Dharmasraya. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan melihat aspek politik yang terjadi dalam proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya serta melihat proses pergantian jabatan birokrasi di Kabupaten Dharmasraya pasca kekosongan jabatan wakil bupati di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam skripsi ini menggunakan teori politisasi birokrasi yang digagas oleh Barbara Geddes. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya indikasi prosedur yang dilangkahi oleh bupati selaku PPK dalam penentuan jabatan birokrasi. Terdapat juga kepentingan bupati terhadap birokrasi untuk menginginkan mesin birokrasi yang loyal serta untuk mempertahankan kekuasaan sendiri hingga habis masa jabatan. Tidak adanya kejelasan atas penjatuhan hukuman yang tergolong kedalam hukuman berat terhadap ASN membuktikan bahwasannya bupati melakukan politisasi birokrasi.

Kata Kunci: Politisasi Birokrasi; Kekosongan Wakil Kepala Daerah; Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya



ABSTRACT

Bureaucratic politicians are a phenomenon related to the creation of reform bureaucracy in the administration of regional government. The positions of Regional Head and Deputy Regional Head are political positions that will lead bureaucratic positions in an area, therefore political influence cannot be separated from the bureaucracy. Dharmasraya Regency is an area that has indications of this bureaucratic bureaucracy, where in Dharmasraya Regency there was a vacancy for the position of Deputy Regent which had an impact on the many cases of non-job ASN within the Dharmasraya Regency government environment. This thesis aims to explain and look at the political aspects that occur in the process of changing bureaucratic positions in Dharmasraya Regency and looking at the process of changing bureaucratic positions in Dharmasraya Regency after the tenure of Deputy Regent in Dharmasraya Regency. This study uses a qualitative research method with a case study approach. This thesis uses the theory of bureaucracy initiated by Barbar Geddes. The results of this study indicate that there are indications of procedures that were bypassed by the regent as PPK in the bureaucracy of bureaucratic positions. There is also the Bupati's desire for a bitocracy to want a loyal bureaucracy and to maintain his own power until the end of his term of office. The absence of clarity over the sentence that is classified as a severe punishment for ASN proves that the Regent is carrying out a bitocratic politics.

Keywords: Bureaucratic Politicians; Vacancies of Deputy Regional Heads; Dharmasraya District Government

